UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS PERAN INSPEKTORAT UTAMA DALAM PENCEGAHAN FRAUD (STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA)
IRWAN WICAKSONO, Suyanto, S.E., M.B.A., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Pada tahun 2017, terdapat dua kasus *fraud* yang melibatkan pemeriksa BPK pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta pada PT Jasa Marga. Terjadinya kasus tersebut mengindikasikan bahwa peran Inspektorat Utama BPK belum optimal dalam mencegah *fraud*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai proses pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Utama serta untuk menganalisis penyebab masih terjadinya *fraud* dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK walaupun upaya pencegahan *fraud* telah dilakukan oleh Inspektorat Utama.

Penelitian ini dilakukan terhadap Inspektorat Utama yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana BPK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik *review* dokumen atas laporan pelaksanaan kegiatan dan peraturan internal di lingkungan BPK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Utama telah melaksanakan lima jenis pencegahan *fraud* di BPK yaitu berupa *prevention, deterrence, disruption, identification*, dan *prosecution*. Sedangkan masih terjadinya *fraud* dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK disebabkan oleh tiga faktor yaitu tekanan karena adanya kebutuhan atau gaya hidup, kesempatan yang muncul karena adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan rasionalisasi.

Kata kunci: penyebab *fraud*, pencegahan *fraud*, BPK

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS PERAN INSPEKTORAT UTAMA DALAM PENCEGAHAN FRAUD (STUDI PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA)
IRWAN WICAKSONO, Suyanto, S.E., M.B.A., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

In 2017, there were two cases of fraud which involved Supreme Audit Institution's (BPK) auditors at the Ministry of Village, Disadvantaged Regions Development and Transmigration; and at PT Jasa Marga. These incidences indicate that the roles of BPK's Inspectorate Office are not yet optimal in preventing fraud. This research aims at obtaining a description and comprehension about the process of fraud prevention conducted by the Inspectorate Office, and to analyze the reasons why fraud cases persist in the process of inspection performed by BPK auditors, despite the many efforts of fraud prevention by the Inspectorate Office.

This research was conducted on the Inspectorate Office which is in charge of performing monitoring on the implementation of all BPK employees' duties and functions. This research uses a qualitative method with a case study approach. The data collection technique used in this research is semi-structured, in-depth interview using an interview guide. Additionally, this research also uses a document review technique on activity performance reports and internal regulations in the BPK.

The research results show that the Inspectorate Office has performed the five types of fraud prevention efforts in the BPK, namely prevention, deterrence, disruption, identification, and prosecution. Whereas the persistence of fraud in the process of examination conducted by the BPK is caused by three factors, namely pressure that comes from needs or lifestyle, opportunity which emerges due to weaknesses in the internal control system, and rationalization.

Keywords: causes of fraud, fraud prevention, BPK